

## **ABSTRAK**

Dinamika perdagangan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pembuatan akta perjanjian jual beli menjadi langkah resmi yang menegaskan validitas setiap transaksi. Dokumen ini tak hanya menjadi bukti tertulis atas kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sarana hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, pengenaan bea materai terbatas pada dokumen dalam lalu lintas hukum masyarakat. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian sah harus didasarkan pada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan tujuan yang halal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Banyak masyarakat yang meyakini bahwa tanpa meterai, perjanjian atau kontrak yang telah dibuat menjadi tidak sah. Oleh karena itu, banyak yang bersedia membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan meterai bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

**Kata kunci : Kedudukan Bea Materai, Kepastian Hukum, Akta Perjanjian Jual Beli.**

## **ABSTRACT**

Trade dynamics in Indonesia have undergone significant transformation over time. Making a sale and purchase agreement deed is an official step that confirms the validity of each transaction. This document is not only written proof of the agreement between the seller and the buyer, but also a legal tool that regulates the rights and obligations of both parties. According to Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty, the imposition of stamp duty is limited to documents in

public legal traffic. Article 1320 of the Civil Code stipulates that a valid agreement must be based on agreement, skill, certain objects and halal goals.

The method used in this research is a normative juridical research type with descriptive research characteristics. Library research (library) data collection techniques which emphasize information sources from law books, journals, papers and opinions that have a relevant relationship to the problem being studied.

Many people believe that without a seal, the agreements or contracts that have been made will be invalid. Therefore, many are willing to re-make their agreements simply because they forgot to give or pay off the seal in the agreement. However, it should be noted that the presence of a seal is not a condition that determines whether an agreement is valid or not.

**Keywords: Position of Stamp Duty, Legal Certainty, Deed of Sale and Purchase Agreement.**